

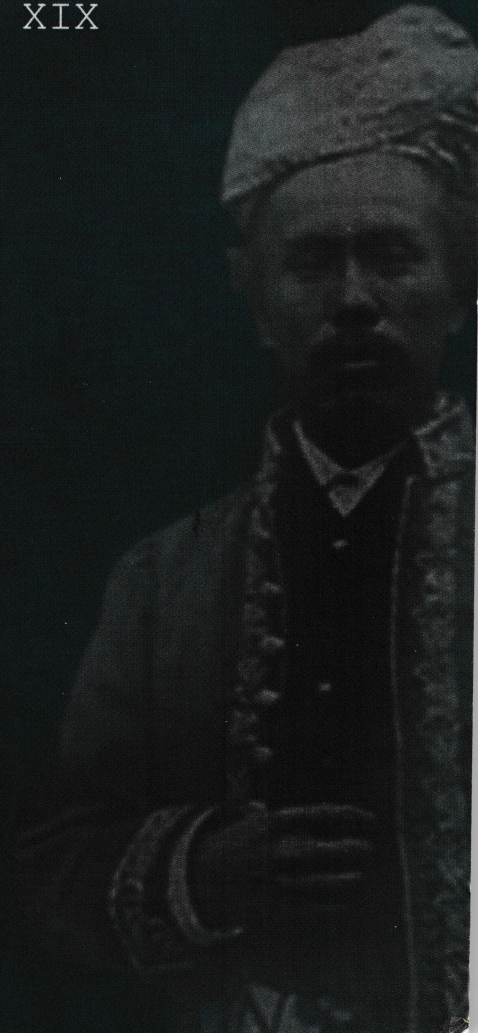
HERWANDI

ANGKU LAREH

Pribumi Pejabat Kolonial Belanda
di Sumatera Barat Abad XIX



FIB
Universitas Andalas



ANGKU LAREH

Pribumi Pejabat Kolonial Belanda di Sumatera Barat Abad XIX

Herwandi

Desain & Layout:

Kaoem Koesam Syndicate (K²S)

Cetakan I, Desember 2012

Penerbit:

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Hak cipta dilindungi Undang-undang

All right reserved

Hak Cipta @ Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Angku Lareh Pribumi Pejabat Kolonial Belanda di Sumatera Barat Abad XIX, Herwandi,
Padang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2012
viii + 74 halaman; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-602-19616-4-3

PRAKATA



Buku ini adalah hasil penelitian untuk penyelesaian tugas akhir jenjang pendidikan S1 (skripsi), ketika penulis hendak menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Andalas (sekarang berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya), Padang pada tahun 1987 yang lalu.

Di dalam buku ini dapat dikatakan tidak dilakukan perubahan, hanya dalam hal bab pendahuluan, sengaja penulis ubah-suai, sesuai dengan kebutuhan guna penerbitan buku ini. Pada prinsipnya isi buku ini tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam skripsi aslinya.

Buku ini diterbitkan, karena adanya permintaan kepada penulis untuk menerbitkannya. Seharusnya buku ini disempurnakan dan dikembangkan sehingga pembahasan semakin mendalam dan penggunaan sumber semakin bertambah banyak dan beragam. Namun penulis sengaja tidak melakukan itu, karena penulis tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

KATA PENGANTAR



Atmosfer akademik akan terbangun dan berjalan dengan baik pada suatu fakultas atau universitas jika Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat senantiasa dapat dilakukan oleh seluruh sivitas akademika secara berkesinambungan. Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi itu sangat ditentukan oleh komitmen semua pihak seperti pimpinan fakultas segenap sivitas akademika yang bernaung di bawah fakultas tersebut.

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas telah mencanangkan dan menumbuh-kembangkan atmosfir akademik melalui pelaksanaan Tri Dharma sebagaimana disebutkan di atas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memotivasi dosen untuk senantiasa menulis buku. Penulisan buku tersebut dapat berupa baik hasil internalisasi dari proses pembelajaran di kelas maupun hasil penelitian dan dilakukan secara berkala. Sebagai perwujudan dari komitmen sebagaimana disebutkan di atas, Fakultas Ilmu Budaya telah membantu dosen menerbitkan karya mereka melalui dana DIPA Fakultas Ilmu Budaya tahun 2012.

DAFTAR ISI



PRAKATA	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Keadaan Masyarakat dan Ekonomi di Minangkabau Awal Abad Ke-19	11
A. Keadaan Masyarakat.....	11
B. Perekonomian dan Persaingan Perdagangan	16
BAB III Munculnya Para Kepala Laras di Minangkabau Abad Ke-19	25
A. Munculnya Jabatan Kepala Laras	25
B. Munculnya Para Kepala Laras	29

1. Pengangkatan Para Kepala Laras.....	29
2. Tugas Dan Gaji Para Kepala Laras	34
C. Para Kepala Laras yang Terkenal.....	36
1. Ismael Datuk Kayo	36
2. Sutan Junaid Datuk di Nagari.....	38
3. Chatib Babaju Ameh.....	40
D. Dampak Munculnya Para Kepala Laras Terhadap Sosial ekonomi di Minangkabau Abad ke-19.....	42
BAB IV Kesimpulan	47
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	57
DAFTAR ISTILAH.....	69
TENTANG PENULIS.....	73

BABI



Pendahuluan

Perdagangan di Minangkabau pada awal abad ke-19 dimotori oleh para Pemimpin Paderi yang menguasai kehidupan politik, walaupun menurut Cristine Dobbin perdagangan pada saat itu mengalami perkembangan yang menggairahkan.¹

Gerakan Paderi di suatu sisi menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat yang anti Paderi. Para penghulu merasa tersingkirkan, karena daerah-daerah yang merupakan "basis" penghasil komoditi ekspor sudah dirampas oleh kaum Paderi. Belanda dalam hal ini juga merasakan dampaknya, sebab kaum Paderi berhasil memutuskan hubungan daerah penghasil komoditi ekspor di Pusat Minangkabau dengan tempat pengeksport komoditi itu di Pesisir Barat yang saat itu dimonopoli oleh Belanda.

Karena terputusnya jalur perdagangan ke Pesisir Barat, Belanda merasa berkepentingan untuk menaklukkan Pusat Minangkabau secara politis, yang bertujuan untuk merampas daerah di Pusat

1. Cristine Dobbin. *Islamic Revivalism in A Changing Peasant Economy: Central Sumatera 1784-1847*. London dan Malmo: Curzon Press Ltd. 1983.

Minangkabau dan hasil perekonomiannya. Tujuan akhir Belanda adalah untuk menghubungkan kembali daerah penghasil komoditi ekspor di Pusat Minangkabau dengan tempat pengekspor komoditi yang dikuasainya di Pesisir Barat.

Seiring dengan penaklukan daerah di Pusat Minangkabau, Belanda membentuk sistim administrasi Pemerintahannya di Minangkabau, guna mengorganisir daerah-daerah di Minangkabau agar perekonomian berjalan baik dan menguntungkan Belanda. Di dalam sistim pemerintahan itu, Belanda membentuk "Laras" untuk mengorganisir Nagari-nagari (Desa tradisional Minangkabau) yang berdekatan, yang dikepalai oleh seorang Kepala Laras.

Sebelum Belanda membentuk Laras itu, masyarakat Minangkabau telah mengenal istilah Laras (biasa disebut dengan *Lareh*), yaitu *Laras nan Duo* (Laras yang dua) ; *Laras Bodi Caniago* dan *Laras Koto Piliang*, yang masing-masing didirikan oleh pemimpin legendaris Minangkabau yakni Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan. Pada hakikatnya, *Laras/Lareh Nan Duo* merupakan sistim pemerintahan tradisional Minangkabau.² Di mana di dalam *Laras Koto Piliang*, memakai sistim pemerintahan yang otoriter, dan para pemimpin masyarakat mempunyai tingkatan tertentu. Dalam ungkapan adat dikatakan sebagai "*Bajanjang naik-batanggo turun*" (berjenjang naik-bertangga turun). Sedangkan di dalam *Laras/Lareh Bodi Caniago*, masing-masing pemimpin masyarakat didudukkan pada status yang sama. Dengan demikian pula pemimpin masyarakat mendapatkan hak yang sama. Di dalam pepatah adat disebutkan "*duduak samo randah, tagak samo tinggi*" (duduk sama rendah, tegak sama tinggi).

Dengan demikian, istilah laras dapat dibedakan menjadi dua; pertama adalah laras secara tradisional, dan yang kedua adalah laras

2. Lihat, A.A. Navis. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers. 1984. Hal. 54-57

“baru” yang muncul pada awal abad ke-19. Laras yang pertama berarti cabang adat,³ merupakan produk masyarakat Minangkabau. Sedangkan Laras yang kedua berarti federasi dari beberapa Nagari, yang merupakan ciptaan Belanda, sudah dijalankan dengan pemikiran yang rasional dan dengan struktur yang jelas.⁴

Di dalam Laras yang tradisional, Penghulu secara kolektif menjalankan roda pemerintahan Nagari dalam sebuah wadah *Kerapatan Adat Nagari*. Para Penghulu bebas menentukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk pembangunan perekonomian Nagari mereka secara otonom. Di dalam Laras tradisional tidak mempunyai Kepala Laras. Sedangkan di masa Pemerintahan Belanda, para Penghulu tidak lagi bebas menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan perekonomian Nagari. Tetapi para penghulu itu sudah diawasi oleh *Penghulu Kepala*. Para *Penghulu Kepala* itupun tunduk di bawah pengawasan seorang Kepala Laras, atasan mereka. Dengan kata lain, hanya setelah Belanda membentuk sistem pemerintahan di Minangkabau muncul istilah Kepala Laras, sebelumnya tidak dimiliki oleh masyarakat, baik dalam adat-istiadat maupun dalam segi lain. Di dalam khasanah sejarah Minangkabau istilah Kepala Laras lebih dikenal dengan *Angku Lareh*. Istilah inilah yang kemudian dipakai untuk judul buku ini.

Masalah Kepala Laras secara umum, sebenarnya sudah pernah dibahas oleh beberapa penulis lain sebelum ini. Rusli Amran, dalam bukunya *Padang Riwayatmu Dulu*,⁵ mengungkapkan bahwa pengangkatan para Kepala Laras adalah dalam rangka pelaksanaan politik Belanda terhadap pemimpin-pemimpin Minangkabau. Sedangkan pada bukunya

3. Laras secara tradisional menurut HAMKA adalah cabang adat. Selanjutnya lihat, HAMKA. *Dari Perbendaharaan lama*. Jakarta: Panjimas. 1982. Hal. 134.

4. Bagi Belanda, Laras sama dengan sebuah Distrik, berarti “*Federatie van Nagari's*” (Federasi dari beberapa Nagari). Lebih jelas, lihat, W.J.Leyds JZN. “Larassen in Minangkabau”, dalam *Kolonial Student*. No.10.1926. hal 389.

5. Rusli Amran. *Padang Riwayatmu Dulu*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya. 1986. Hal. 195-196

yang lain, *Sumatra Barat Plakat Panjang*,⁶ Rusli Amran mengungkapkan masalah Kepala Laras dalam rangkaian menerangkan hancurnya pemerintahan adat Minangkabau pada awal abad ke-19.

HAMKA, dalam bukunya *Dari Pembendaharaan Lama*,⁷ menguraikan masalah Kepala Laras dan peran sosialnya di masyarakat Minangkabau. Buku ini hanya mengungkapkan beberapa Kepala Laras di Minangkabau.

Dalam artikel *The Making Of Schakel Society: The Minangkabau In The Late Of 19th Century*,⁸ Taufik Abdullah mengungkapkan bahwa Kepala Laras ikut mengambil bagian dan menjadi salah satu cikal bakal untuk terbentuknya masyarakat *Schakel*, yaitu suatu kelompok masyarakat yang berasal dari Bumiputra tetapi tidak lagi sepenuhnya mendukung nilai-nilai budaya tradisional Minangkabau. Pada dasarnya tulisan Taufik Abdullah ini lebih menekankan terhadap aspek sosial budaya Minangkabau.

Masalah Kepala Laras juga dapat dilihat di dalam : *Social Change in A Cintrifugal Society: The Minangkabau of West Sumatera*,⁹ kemudian dalam artikel *Larassen in Minangkabau*,¹⁰ juga dalam sebuah Thesis *Social Change in The West Sumatran Village: 1908-1945*,¹¹ dan di dalam *Islamic Revivalism in A Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-1847*,¹² tulisan-tulisan ini adalah dibuat dan ditulis oleh para pengarangnya hanya untuk mendukung pembicaraan

6. Rusli Amran. *Sumatra Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan. 1985. Hal. 187-203
7. HAMKA. *Loc. cit.*
8. Taufik Abdullah. "The Making Of Schakel Society: The Minangkabau In The Late Of 19th Century", dalam *Papers The Dutch-Indonesian Historical Conference*. Leiden/Jakarta : The Bureau of Indonesia Studies Under the Auspices of The Dutch and Indonesian Steering Committees of The Indonesian Studies program. 1978. Hal. 143-153.
9. Tsuyoshi Kato. "Social Change in A Cintrifugal Society: The Minangkabau of West Sumatera", *Thesis for the degree of Doctor of Philosophy*. Cornell University-Ithaca. 1977.
10. W.J. Leyds. JZN. *Loc. cit.*
11. Akira Oki. "Social Change in The West Sumatran Village: 1908-1945". *Thesis for Degree of Doctor of Philosphy*. Canberra. Australian inuversity. 1977.
12. Cristine Dobbin. *Loc. cit.*

mereka tentang sesuatu yang di luar masalah Kepala Laras sendiri. Dengan kata lain, walaupun mereka menyinggung masalah Kepala Laras, ini mereka lakukan tidak secara khusus.

Jadi, dari beberapa tulisan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, tulisan-tulisan itu masih berkisar pada aspek sosial, politik dan budaya di Minangkabau.

Karena keadaan seperti di atas, penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan Kepala Laras itu secara khusus, yang mempunyai latar belakang sosial ekonomi. Tentu saja pengkajian ini terbatas pada sumber-sumber yang didapatkan, untuk mengangkat masalah ini ke dalam kajian yang bersifat ilmiah.

Permasalahan yang dibahas dalam buku ini adalah tentang kaitan antara perluasan aktivitas perekonomian Belanda di Minangkabau dengan diangkatnya para Kepala Laras di Minangkabau. Sehubungan dengan itu, ada beberapa pertanyaan yang diajukan sebagai batasan permasalahan. Penulisan ini akan dimulai dengan melihat situasi masyarakat dan perdagangan di Minangkabau, pada awal abad ke-19, yaitu saat dikembalikannya Minangkabau oleh Inggris kepada Belanda tahun 1819 guna mewujudkan isi Konvensi London pada tahun 1814.

Pada awal abad ke-19 aktivitas perdagangan Belanda di Minangkabau terbatas hanya di kota-kota pantai di Pesisir Barat saja, seperti: Padang, Pariaman, Air Haji dan Painan.¹³ Bagaimanakah situasi perdagangan awal abad ke-19 di Minangkabau, sehingga Pemerintah Belanda di Padang mengambil keputusan untuk memperluas daerah aktivitas perdagangannya ke pedalaman? Bagaimana pulakah peran golongan-golongan sosial yang ada di Minangkabau, seperti Penghulu, Kaum Ulama dalam perdagangan ini?

Akibat adanya gerakan Paderi, semenjak akhir abad ke-18 sampai tahun 1837, Padang terancam statusnya sebagai pusat perdagangan,

13. Lihat, Rusli Amran. *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan. 1981. Hal. 369

karena kaum Paderi berhasil menutup jalur perdagangan ke Pesisir Barat dan berusaha memanfaatkan jalur perdagangan ke tempat-tempat yang diperkirakan bebas dari Belanda. Gerakan ini berarti juga memutuskan hubungan daerah Pusat Minangkabau sebagai penghasil komoditi ekspor dengan kota-kota pantai di Pesisir Barat yang dikuasai oleh Belanda.

Untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan ke Pesisir Barat dan untuk mengamankan daerah penghasil komoditi ekspor di Pusat Minangkabau, maka Belanda memerlukan wakil-wakilnya dari kalangan Bumiputera sebagai agen perdagangannya. Kemudian dibentuklah sistim administrasi pemerintahan baru oleh Belanda, yang disebut Laras, dan dikepalai oleh seorang Kepala Laras.¹⁴ Apakah dibentuknya Laras oleh Belanda di Minangkabau secara bersamaan atautkah di daerah-daerah tertentu saja? Dari golongan sosial manakah dalam masyarakat Minangkabau yang diangkat menjadi Kepala Laras? Adakah syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi Kepala Laras? Apakah tugas dan berapakah gaji mereka di dalam sistim pemerintahan yang baru tersebut?

Berdasarkan sumber-sumber yang ditemukan ada beberapa Kepala Laras yang diangkat Belanda dalam periode abad ke-19 yang menonjol jika dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka itu antara lain adalah Ismael Datuk Kayo dan Sutan Junaid Datuk Di Nagari (Kepala Laras di Koto Gadang, serta Chatib Babaju Ameh) Kepala Laras Banuampu. Bagaimanakah usaha-usaha mereka sehingga mereka menjadi Kepala Laras yang istimewa dari yang lain.

Permasalahan yang paling akhir diajukan dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah dampak kehadiran Para Kepala Laras terhadap aspek sosial ekonomi di Minangkabau pada abad ke-19?

14. Lihat, Cristine Dobbin. *Op.cit.* Hal. 152. Istilah yang lain dipergunakan adalah *TuanKu Lareh*, lihat Rusli Amran. *Padang Riwayatmu Dulu*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya. 1986. Hal. 195; ada juga yang menyebut dengan *Larashoofd*, lihat L.G. Westenek. "De Inlandsch bestuurshoofden ter Sumatra's Westkust", dalam *Kolonial Tijdschrift*. No.2.bg. II. Den Haag. Hal 833.

Sebagai pembatasan masalahnya penulis mengambil Minangkabau yang merangkum *Darek*, *Rantau*, dan *Pasisie*. *Darek* (Darat), yakni istilah untuk mengatakan *Luhak Nan Tigo*¹⁵ (*Luhak* yang tiga), yang masing-masing adalah *Luhak* Agam, *Luhak* Limapuluh Koto, dan *Luhak* Tanah Datar yang merupakan daerah Pusat Minangkabau. Kemudian *Rantau* adalah daerah “pinggiran”, yang pada suatu saat muncul sebagai “koloni” masyarakat Minangkabau, tergantung maju-mundurnya kekuasaan pusat Kerajaan Pagaruyung. Daerah-daerah *Rantau*, terhampar di pantai Timur dan Barat Pulau Sumatra bagian tengah. *Rantau* di pantai Timur disebut *Pasisie* Timur, dan *Rantau* di Pantai Barat disebut *Pasisie* Barat (Pesisir Barat). Namun selanjutnya pada awal abad ke-19 hanya daerah *Rantau* di Pesisir Barat saja yang dikatakan Pesisir. Sedangkan wilayah Minangkabau semenjak akhir abad ke-18 secara keseluruhan hanya mencakup daerah *Darek* dan Pesisir Barat saja.

Oleh sebab itu, hanya daerah yang disebut dengan *Darek* dan Pesisir Barat saja yang memakai istilah Kepala Laras. Karena, daerah ini saja dari daerah Minangkabau yang termasuk ke dalam wilayah *Sumatra's Westkust* tempat dilaksanakan sistim Laras oleh Belanda pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Daerah-daerah yang terdapat di *Darek* disebut dengan *Padangsche Bovenlanden*, dan daerah-daerah yang terhampar di Pesisir Barat disebut dengan *Padangsche Benedenlanden*. Oleh sebab itu di dalam penulisan ini yang menjadi pembicaraan, batas ruang, adalah daerah-daerah di *Darek* dan Pesisir Barat tersebut.¹⁶

15. *Luhak Nan Tigo* adalah suatu pembagian wilayah secara *etnografis* di Minangkabau.

16. *Darek* dan *Pesisir*, juga dibedakan oleh Belanda dengan: *Hoofdafdeeling* Minangkabau, untuk menghimpun daerah di *Darek*; *Hoofdafdeeling* padang untuk menghimpun daerah di Pesisir Barat. Selanjutnya lihat, *Provisioneel Reglement op het binenlandsche bestuur in dat der Financien in de Residentie Padang en Onder Hoorigheden*. Arsip Nasional. SWK. No .143. Selanjutnya lihat juga, Rusli Amran. *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan. 1981. Hal. 422.

Di samping itu, penulis mempergunakan jarak waktu di dalam penulisan ini, semenjak Belanda mengambil alih kekuasaan dari Inggris di Minangkabau pada tahun 1819, guna menelusuri latar belakang munculnya Para Kepala Laras di Minangkabau pada tahun 1823, dan akan diakhiri dengan melihat dampak munculnya Para kepala Laras bagi perekonomian Minangkabau pada akhir abad ke-19.

Minangkabau yang penulis maksudkan di sini adalah dalam pengertian Lokal. Sedangkan peristiwa munculnya para Kepala Laras di Minangkabau pada abad ke-19, erat hubungannya dengan Sejarah Lokal. Oleh sebab itu penulisan ini akan mengarah terhadap penulisan yang berbau Sejarah Lokal, yang perlu memperhatikan kompleksnya zaman dalam waktu yang ditetapkan.

Penulisan ini didukung oleh beberapa sumber Sejarah yang dapat dikategorikan ke dalam sumber-sumber primer dan sekunder.

Dari sumber-sumber tersebut penulis menemukan data-data yang dibutuhkan untuk penulisan, yang sebelumnya sudah disaring sebatas kemampuan penulis. Data-data dianalisa dan diinterpretasi, guna melahirkan fakta-fakta yang “hidup”, dirangkaikan dan direkonstruksi untuk mendapatkan gambaran peristiwa Sejarah yang “utuh”, kemudian dituangkan dalam penulisan.

Untuk kebutuhan penulisan ini, sumber-sumber primer yang didapatkan di Arsip Nasional Indonesia, di Jakarta, berupa dokumen-dokumen Belanda, yang antara lain adalah :

1. *Provisioneel Reglement op het binenlandsch Bestuur in dat der Financien in de Residentie Padang en onder hoorigheden.*
2. *Besluiten van den Gouvernement Kommissaris van en met 11 Juni 1840.*
3. *Extract uit het Register der Handelingen en Resoloutien van den Gouvernement General en Rade 27 November 1824.*
4. *Extract uit het Register der Handelingen en Resoloutien van den Gouvernement General en Rade 4 November 1824.*

5. *Instructievoor den Assistent Resident van de Afdeeling der Padangsche Bovenlanden, 1 Maart 1825.*
6. *Mutatie-Staat—Inlandsche hoofden, ambtenaren en kamponghoofden.*
7. *Staatsblad van Nederlansch-Indie. No. 327. 1876.*
8. Steinmetzs. *"Ik heb de eer ilhoog Edel Iestrenge is bijlage dezes aan te bieden de Nummersge wijze beantwering der vragen op voostellen aan het Gouvernement gedaan vervat in ilwe misjive van den 29 Desember a.p Lett. A."*

Sumber-sumber sekunder, yang ditemukan berupa artikel-artikel, buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas. Adapun artikel yang banyak membantu adalah "*De Inlandsch bestuurshoofden ter Sumatra's Westkust*" karya L.C. Westenenk, artikel "*Het Suku-bestuur in de Padangsche Bovenlanden*" karya D.G. Stibbe. Thesis Elizabeth E. Graves yang berjudul "*The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule In Nineteenth Century*", buku Christine Dobbin yang berjudul "*Islamic Revivalism in A Changing Peasant Economy: Central Sumatera 1784-1847*", thesis Tsuyoshi Kato yang berjudul "*Social Change in A Centrifugal Society: The Minangkabau of West Sumatra*", banyak membantu penulis dalam menambah referensi untuk penulisan ini. Di samping itu masih ada buku-buku, tulisan-tulisan, artikel-artikel lain yang dipergunakan, secara keseluruhan disusun di dalam daftar pustaka.



BAB II



Keadaan Masyarakat dan Ekonomi di Minangkabau Awal Abad Ke-19

Para Kepala Laras muncul di Minangkabau tidak terlepas dari keadaan zaman dan kompleksnya kondisi masyarakat pada awal abad ke-19. Oleh sebab itu, pada penulisan ini terlebih dahulu dikaji keadaan masyarakat dan ekonomi di Minangkabau pada awal abad ke-19.

A. Keadaan Masyarakat

Di dalam masyarakat Minangkabau terdapat golongan-golongan sosial yang berperan penting di Panggung Sejarah Minangkabau pada awal abad ke-19. Golongan-golongan sosial tersebut di antaranya adalah; golongan Bangsawan "Istana", Kaum Penghulu, dan Kaum Ulama.

Golongan Bangsawan "Istana" adalah golongan sosial "*feodalis*", yang terdapat di pusat pemerintahan Kerajaan Pagarruyung, maupun di pusat Pemerintahan kerajaan-kerajaan "kecil" di daerah *rantau*


TENTANG PENULIS



Herwandi, lahir di *nagari* Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat tepatnya pada tanggal 13 September 1962. Pada tahun 1987, ia menamatkan pendidikan S1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra (saat ini sudah berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Andalas. Pada tahun 1992 ia melanjutkan Pendidikan S2 di Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia dan selesai pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 2008 ia kembali melanjutkan studinya S3 pada program yang sama di Universitas Indonesia dan selesai tahun 2002. Dari tahun 1989 sampai sekarang menjadi staf pengajar di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Yang bersangkutan telah menerbitkan sejumlah buku baik yang ditulis sendiri maupun secara bersama. Buku-buku tersebut antara lain:

1. Herwandi. *“Boengong – Boengong Kulimah: Tasawuf Islam Masa Kerajaan Aceh Darussalam”*, dalam buku *Manassa Sumatera Barat. Penelitian Naskah Nusantara dari Sudut Pandang Kebudayaan*

- Nusantara Kumpulan Makalah Simposium Internasional Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) V*, Padang 2001.
2. Herwandi. *Bungong Kalimah: Kaligrafi Islam Dalam Balutan Taswuf Aceh (Abad ke-16 – 18 M)* Padang: Unand Press. 2003;
 3. Herwandi, Zaiyardam Zubir, Restu Pramona, Riza Mutia. *Rakena Mandeh Rubiah Penerus Kebesaran Bundo Kandung Dalam Penggerogotan Tradisi*. Padang: PSH Unand. 2004, ISBN 978-979-15786-0-0;
 4. Herwandi (edt.). *Membangkit Batang Tarandam: Kumpulan Makalah Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau*. Padang: Panitia Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau 2004.
 5. Herwandi dan Zaiyardam Zubir (eds). *Menggugat Minangkabau*. Padang: Unand Press. 2005.; ISBN: 979-3364-24-6
 6. Herwandi (edt). *Kebijakan Setengah Hati dan Kerisauan Tentang Degredasi Budaya Minangkabau*. Padang: PSH. 2007. ISBN:978-979-15786-0-0
 7. Herwandi. "Refleksi Akulturasi pada bangunan-Bangunan Ibadah di Minangkabau" dalam Rusydi Ramli dan Ilham. *Pengantar Arkeologi*. Padang: Hikmah. 2006. ISBN: 979-36608-3-x;
 8. "Sawahlunto dan Malaka: Kerjasama Kota "Kembar" dalam Bidang Pengelolaan Sumberdaya Budaya". Dalam buku Mohammad Redzuan Othman dkk. (eds.) *"Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia"*. Kualalumpur: Arah Publications. 2009. Hal. 207-226.



Angku Lareh adalah pejabat kolonial Belanda yang diangkat dari elite pribumi pada masa-masa awal Belanda menguasai Minangkabau secara politis sekitaran awal abad ke-19.

Buku ini cukup sederhana namun berguna untuk mempelajari kiprah awal Belanda dalam mencengkramkan kekuasaannya di bumi Minangkabau, termasuk dalam memanfaatkan kondisi perpecahan dalam masyarakat yang terkenal dengan "Perang Paderi".

Kondisi itu dipergunakan oleh Belanda untuk menguasai jengkal demi jengkal tanah Minangkabau, dan menanamkan pengaruhnya dengan membentuk sistem pemerintahan Laras serta mengangkat sejumlah Kepala Laras, yang kemudian terkenal dengan Angku Lareh di setiap daerah yang ditaklukkannya.

Selamat membaca !

Penerbit:
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas
Padang, Sumatera Barat

ISBN: 978-602-19616-4-3

